

Peran BUMDes Terhadap Pengelolaan Wisata Mangrove Kedatim Kabupaten Sumenep Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Lokal

Widya Khairani^{1*}; Herry Yulistiyono²

^{1,2}Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Trunojoyo Madura

Email: 190231100106@student.trunojoyo.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.21107/bep.v4i1.20036>

ABSTRACT

Kedatim Mangrove Tourism is one of the tours in the village of Kebun Dadap Timur, Sumenep Regency which is managed by BUMDes, initiated in 2018 and opened in 2021. Kedatim Mangrove Tourism managed to be ranked 3rd out of 1,407 tourist villages in the Nusantara Tourism Village Promotion competition phase 1 by the Ministry of Villages for Development of Disadvantaged Regions and Transmigration (Kemendes PDTT) which was registered in the Nusantara Tourism Village application. This is because Kedatim Mangrove Tourism has shown synergy in preserving the natural environment with the economic growth of the village. The purpose of this study is to determine the role of Pasopati Village-Owned Enterprises (BUMDes) in the management of Kedatim mangrove tourism as an effort to improve the local economy and the impact of Kedatim Mangrove Tourism on the community to improve the economy. This type of research uses qualitative descriptive research methods. Based on research, BUMDes has played a good role as a facilitator, mediator and motivator in the management of Kedatim Mangrove Tourism. So that it has a positive and beneficial impact on the economy felt by the local community of East Dadap Plantation Village, as well as on the original income of the village. On the other hand, the government is expected to be more aggressive in helping BUMDes to provide support in the form of counseling to the community about the importance of mangroves and the potential that mangroves have for their economy.

Keywords: *Role of BUMDes, Mangrove Ecotourism, Local Economy*

ABSTRAK

Wisata Mangrove Kedatim merupakan salah satu wisata di desa Kebun Dadap Timur, Kabupaten Sumenep yang dikelola oleh BUMDes, dirintis sejak 2018 dan dibuka pada tahun 2021. Wisata Mangrove Kedatim berhasil menduduki peringkat 3 dari 1.407 desa wisata dalam lomba Promosi Desa Wisata Nusantara tahap 1 oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) yang terdaftar dalam aplikasi Desa Wisata Nusantara. Hal ini dikarenakan Wisata Mangrove Kedatim telah menunjukkan sinergitas pelestarian lingkungan alamiah dengan pertumbuhan ekonomi desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pasopati dalam pengelolaan wisata mangrove kedatim sebagai upaya

meningkatkan perekonomian lokal dan dampak dari adanya Wisata Mangrove Kedatim terhadap masyarakat unuk meningkatkan perekonomian. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian, BUMDes telah berperan dengan baik sebagai fasilitator, mediator dan motivator dalam pengelolaan Wisata Mangrove Kedatim. Sehingga berdampak positif dan bermanfaat terhadap perekonomian yang dirasakan oleh masyarakat lokal Desa Kebun Dadap Timur, maupun pada pendapatan asli desanya. Disisi lain, pemerintah diharapkan lebih gencar dalam membantu BUMDes untuk memberikan dukungan berupa penyuluhan terhadap masyarakat akan pentingnya mangrove dan potensi yang dimiliki mangrove bagi perekonomian mereka.

Kata kunci: Peran BUMDes, Ekowisata Mangrove, Perekonomian Lokal

PENDAHULUAN

Dalam rangkaian pembangunan daerah dan nasional pembangunan desa penting dan strategi karena didalamnya mengandung unsur pemetaan yang secara langsung menyentuh kepentingan dan kesejahteraan mayoritas Indonesia. Sebagian besar penduduk Indonesia hidup di daerah pedesaan, akan tetapi kenyataannya pembangunan di pedesaan masih kurang hingga banyak pedesaan yang masih tertinggal. Pembangunan nasional dilaksanakan sampai ke tingkat yang paling rendah yang selanjutnya disebut sebagai otonomi desa. Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 otonomi desa bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik untuk menata/mengatur alokasi sumber-sumber dan distribusi pendapatan, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa, dan meningkatkan daya saing desa. Praktik yang terjadi saat ini kebijakan pembangunan cenderung lebih memihak pada pembangunan perkotaan dibandingkan pembangunan pedesaan, Akibatnya, muncul kesenjangan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi antara perkotaan dan pedesaan. Upaya pemerintah dalam membentuk kemandirian desa dan meningkatkan daya saing desa adalah dengan menggelontorkan berbagai dana untuk program pembangunan desa yang salah satunya adalah didirikan Lembaga Ekonomi Desa (LED) melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

BUMDes merupakan salah satu usaha desa dalam bentuk lembaga yang pengelolaanya dijalankan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa guna mendorong peningkatan perekonomian masyarakat desa atau termasuk usaha dari desa, oleh desa dan untuk desa, namun dalam pelaksanaannya tetap mengacu pada kebutuhan masyarakat dan potensi desa yang ada. Hal ini sesuai dengan aturan tentang BUMDes yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja secara umum menyebutkan bahwa pendirian BUMDes dilakukan sesuai dengan kebutuhan serta memperhatikan potensi desa yang dimiliki tujuan sebagai upaya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pemerintah desa memiliki hak pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia secara mandiri, sehingga pemerintah desa bisa menentukan program yang sesuai dengan potensi desa tersebut (Maryam et al., 2022).

Peran BUMDes termuat dalam Undang Undang No 6 Tahun 2014 tentang

desa terkait hasil BUMDes bermanfaat disamping membangun desa, pemberdayaan masyarakat, serta membantu masyarakat kurang mampu lewat hibah, bantuan social, dana bergilir, dipatenkan dalam rancangan hasil dan belanja desa. BUMDes sepenuhnya dikelola oleh masyarakat desa, yakni dari desa, oleh desa dan untuk desa. Mewadahi kegiatan ekonomi masyarakat dalam wujud Lembaga atau badan usaha professional, tetap berdasar pada potensi murni desa merupakan cara kerja dari BUMDes. Desa memiliki banyak potensi murni yang dapat dikembangkan, salah satu potensi desa di Indonesia yang masih belum dimanfaatkan atau belum diolah secara maksimal yaitu pada sektor pariwisata.

Pengelolaan pariwisata di desa penting dilakukan mengingat desa kaya akan potensi wisata, alami, belum mengalami banyak perubahan dan terjaga keasliannya sehingga digemari oleh wisatawan. Perkembangan pariwisata diharapkan mampu memacu pertumbuhan perekonomian Indonesia, selain bermanfaat dalam meningkatkan lapangan kerja perkembangan industri pariwisata dapat bertujuan dalam memperkenalkan budaya dan keindahan alam Indonesia. Perkembangan sektor pariwisata juga merupakan salah satu komponen pembangunan nasional, maka dari itu saat ini desa wisata sangat potensial dikembangkan. Menurut definisi dari (Dewi, 2013) Desa wisata adalah bentuk penerapan pembangunan pariwisata berbasis masyarakat dan berkelanjutan. Tujuan dari pembangunan pariwisata yang melibatkan masyarakat diantaranya yaitu adalah 1) memberdayakan masyarakat melalui suatu pembangunan pariwisata, 2) meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat agar dapat memperoleh keuntungan ekonomi, sosial, maupun budaya dari pembangunan pariwisata tersebut, 3) memberikan kesempatan yang seimbang kepada semua anggota masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan (Munawaroh, 2017). Pemerataan yang sesuai dengan konsep pembangunan pariwisata yang berkesinambungan diharapkan tercapai melalui pengembangan desa wisata.

Salah satu desa wisata yang saat ini dikembangkan adalah Desa Kebun dadap timur yang terletak di Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep, Madura Jawa Timur. Salah satu wisata yang terdapat di desa Kebun dadap timur adalah wisata Mangrove Kedadatim. Wisata Mangrove Kedadatim resmi dibuka pada Juni 2021 tahun lalu. Pada tahun 2022 ketika diluncurkan Lomba Promosi Desa Wisata Nusantara tahap 1 oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Wisata Mangrove Kedadatim berhasil menduduki peringkat 3 dari 1.407 desa wisata yang terdaftar dalam aplikasi Desa Wisata Nusantara. Hal ini dikarenakan Wisata Mangrove Kedadatim telah menunjukkan sinergitas pelestarian lingkungan alamiah dengan pertumbuhan ekonomi desa.

Wisata mangrove kedadatim bermula dari masyarakat yang peduli akan desanya dan sadar akan potensi mangrove yang ada di muara kali sarokah yang dapat dikelola sehingga memiliki nilai positif dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Maka terbentuklah kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) "Reng Paseser" pada tahun 2017 dan mulai melakukan proker penanaman dengan membeli swadaya bibit mangrove pada tahun 2018 dan menjadi titik awal pembangunan Wisata Mangrove Kedadatim. Dari program pembibitan tersebut kemudian diikuti dan dilanjutkan oleh beberapa organisasi masyarakat lainnya seperti Kelompok sadar wisata (Pokdarwis). Agar terkelola dengan baik dan secara professional mengenai pembangunan akses dan

fasilitas wisata desanya, maka usaha wisata desa ini dikelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pasopati. Dikutip dari tribunnews.com menurut direktur BUMDes Pasopati, wisata mangrove kedatim ini telah membantu meningkatkan pendapatan warga desa ,dengan terbukanya lapangan kerja baru bersamaan dengan perdagangan bagi warga lokal dan berkontribusi pada Pendapat Asli Desa.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, tujuan dari penelitian ini berupaya menjelaskan (1) bagaimana peran BUMDes Pasopati dalam mengelola wisata mangrove kedatim sebagai upaya meningkatkan perekonomian lokal dan (2) bagaimana dampak adanya wisata mangrove kedatim terhadap masyarakat dalam meningkatkan perekonomian menjadi fokus permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Peran

Teori peran (*Role Theory*) digambarkan dalam bentuk interaksi sosial antaraktor yang tampil sesuai dengan ketetapan yang berlaku dalam kebudayaan. Dalam Ishak et al., (2017) dikatakan bahwa beberapa peneliti mulai dari Mead (1934) sampai Turner (1978) menyimpulkan bahwa teori peran memainkan peran penting dalam memahami perilaku karyawan organisasi dan memainkan peran penting dalam tatanan sosial. Disampaikan oleh Biddle dalam Prayudi (2019) teori peran umumnya berkonsentrasi pada salah satu elemen kunci dari perilaku sosial. Orang merespons secara berbeda dan dapat diprediksi tergantung pada lingkungan spesifik dan identitas sosial mereka. Teori ini mengemukakan bahwa setiap pribadi seseorang memiliki peran tertentu.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengertian BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa menurut Permendesa PD TT No. 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa adalah “usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa”. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Badan Usaha Milik Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau hersarna desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebcsar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa (Pemerintah Republik Indonesia, 2021).

Karakteristik BUMDes yaitu: 1) dimiliki dan dikelola oleh desa, 2) Modal usaha dan modal kerja bersumber dari dana desa (51%) dan masyarakat (49%) dengan cara sebagai pemodal, 3) Pengelolaannya berdasarkan local wisdom, 4) Laba yang diperoleh diguna- kan untuk mengembangkan usaha masyarakat dan desa, 5) Bergerak di bidang usaha yang memperhatikan keunggulan desa dan informasi tentang pasar, 6) Keberadaannya difasilitasi oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. 7) Pengawasan dilakukan secara bersama oleh Pemerintah Desa, BPD dan anggota (Kushartono, 2016). Terdapat 6 prinsip

dalam mengelola BUMDes yaitu: 1. Kooperatif, 2. Partisipatif, 3. Emansipatif, 4. Transparan, 5. Akuntabel, 6. Sustainabel.

Menurut Prasetyo (2019) terdapat peran BUMDes secara umum, yaitu: 1. Sebagai Fasilitator, BUMDes akan memfasilitasi seluruh kegiatan perencanaan badan usaha dan membantu masyarakat desa dalam meningkatkan kesejahteraannya melalui pembentukan unit usaha oleh BUMDes dengan persetujuan pemerintah desa. 2. BUMDes sebagai Mediator merupakan bertugas sebagai perantara bagi masyarakat untuk mewujudkan hasil dari rencana usaha yang telah disusun dan diusulkan. 3. Sebagai Motivator, BUMDes akan menjunjung tinggi posisi ini dan dianggap sebagai cikal bakal organisasi bisnis yang menginspirasi masyarakat dan pemerintah desa untuk lebih terlibat dan memperluas wawasan mereka untuk berkontribusi pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di masa depan.

Pengembangan Ekonomi Lokal

Pengembangan ekonomi lokal adalah suatu proses yang melibatkan pembentukan kelembagaan baru, perkembangan industri baru, pengembangan kapasitas pekerja untuk menghasilkan produk yang lebih bermutu, identifikasi pasar baru serta pendirian usaha-usaha baru (dalam Mulyana *et al.*, 2017). Pengembangan ekonomi lokal sebagai peningkatan peran elemen-elemen endogenous dalam kehidupan sosial ekonomi suatu lokalitas dengan tetap melihat keterkaitan serta integrasinya secara fungsional dan spasial dengan wilayah yang lebih luas (Coffey *et al.*, 1984 dalam Riyanto *et al.*, 2018). Terkait dengan PEL, Meyer-Stamer (2005: 4) menjabarkan terdapat enam aspek dalam PEL, yaitu: (1) Kelompok sasaran pengembangan ekonomi lokal; (2) Faktor lokasi; (3) Sinergi; (4) Pembangunan berkelanjutan yang melihat pada aspek ekonomi, ekologis, dan sosial; (5) Tata pemerintahan terdiri dari kemitraan dengan sektor publik dan swasta, perampingan regulasi di sektor publik dan pengembangan organisasi; (6) Manajemen, pengembangan ekonomi lokal didasarkan pada proses berulang dengan landasan diagnostik dan perencanaan, implementasi, dan monitoring serta evaluasi. Dari enam aspek tersebut tentu menjadi ukuran pada pelaksanaan atau implementasi PEL (dalam Huda, 2020).

Pengelolaan Wisata dalam Skala Desa

Definisi pengelolaan pariwisata alam adalah suatu kegiatan terpadu dalam perencanaan, penataan, pengembangan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengawasan, perlindungan dan pengendalian pariwisata alam. Pengelolaan pariwisata yang melibatkan masyarakat, tidak terjadi pada pariwisata konvensional yang memprioritaskan jumlah pengunjung dengan mengabaikan atau kurang memperhatikan partisipasi masyarakat lokal. Penerapan pariwisata berbasis masyarakat dianggap mampu memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat yaitu peningkatan kesejahteraan, perlindungan terhadap lingkungan, serta perlindungan terhadap kehidupan sosial dan budaya mereka (Purmada *et al.*, 2016). Dapat diartikan bahwa pengelolaan wisata yang melibatkan masyarakat adalah pengelolaan wisata dalam skala desa, yang dalam pengelolaannya melibatkan masyarakat desa dan manfaat yang didapat juga diberikan untuk masyarakat desa. Salah satu pengelolaan wisata dalam skala desa adalah adanya pengembangan desa wisata. Menurut (Hariyanto, 2016) Isu utama dalam pengembangan desa wisata adalah mengenai kontribusi positif aktifitas pariwisata di desa wisata terhadap kehidupan ekonomi masyarakat lokal.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan (Sukmadinata, 2011). Penelitian ini dilakukan pada lokasi yang dapat menunjang penelitian yaitu Desa Kebundadap Timur Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep dengan potensi Wisata Mangrove yang dimilikinya. Sumber data pada penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder.

Metode pengumpulan data pada penelitian ini yaitu, observasi/penelitian lapangan (*field research*), wawancara, dan studi kepustakaan (*library research*). Metode pengumpulan data tersebut adalah untuk memperoleh informasi primer dan sekunder yang lebih komprehensif dan mendalam tentang topik yang diangkat oleh penulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran BUMDes dalam Pengelolaan Wisata Mangrove Kedatim

Ditetapkannya Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 mengenai Badan Usaha Milik Desa adalah badan hukum yang dibentuk oleh desa atau desa secara bersama-sama menjalankan usaha, memanfaatkan kekayaan, meningkatkan investasi dan produktivitas, memberikan pelayanan, dan menjalankan usaha lain untuk kepentingan masyarakat desa. Untuk memenuhi kepentingan masyarakat desa, upaya yang dapat dilakukan oleh BUMDes adalah pemberdayaan yaitu dengan cara melibatkan masyarakat da lam usaha BUMDesa. Menurut Kapita et al., (2017) Pemberdayaan masyarakat meliputi secara fisik dan non fisik. Pemberdayaan secara fisik seperti pembangunan infrastruktur terkait apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sedangkan untuk pemberdayaan secara non fisik dapat berupa peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat seperti mengadakan penyuluhan atau sosialisasi. Dwiningwarni (2020) menyebutkan bahwa peran BUMDesa dalam mengelola dana desa sangat diperlukan, khususnya pada pemberdayaan masyarakat desa. BUMDesa harus membentuk dan menumbuhkan usaha mandiri masyarakat desa melalui pengelolaan dana desa. Dengan pengelolaan yang tepat dan benar maka pendapatan masyarakat dapat meningkat. Disampaikan oleh Pangestu (2020) bahwa dengan adanya peran BUMDes sangat membantu pemberdayaan masyarakat sehingga perekonomian masyarakat menjadi perekonomian yang lebih mandiri. Prasetyo (2019) menuturkan terdapat peran BUMDes secara umum yaitu, sebagai fasilitator, mediator dan motivator. Salah satunya selaras dengan hasil penelitian Darwita (2018) menyatakan bahwa peran BUMDesa dalam pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan cara memberikan motivasi kepada masyarakat desa berupa pinjaman modal usaha, sehingga tingkat pengangguran dapat ditekan. Hal ini membuktikan bahwasannya dalam mengelola desa atau pengelolaan desa melalui Badan Usaha Milik Desa bukan suatu hal yang mudah, karena membutuhkan perhatian khusus semacam kemampuan pengetahuan dan keterampilan mengenai perencanaan pembangunan serta kepekaan terkait kondisi desa yang ditempati (Nur Istiyani Harun, Annisa Rizqa Alamri, Dewi Walahe, 2021).

Hasil wawancara penelitian mengenai peran BUMDes terhadap pengelolaan Wisata Mangrove Kedatim diketahui bahwa BUMDes Pasopati sudah maksimal dan berjalan dengan baik dalam menjalankan peran-perannya, diantaranya sebagai fasilitator dalam pengembangan dan pengelolaan potensi desa dalam bentuk modal ataupun pembinaan. Hal ini dikarenakan dengan jangka waktu pengelolaan yang masih tergolong baru atau masih muda dengan kurun waktu satu tahun dibawah naungan BUMDes, serta tahapan pembangunan dan pengembangan wisata mangrove kedatim yang jika dipersentasekan masih kurang lebih 45 persen, tapi mampu menciptakan potensi mangrove yang ada di desa kebun dadap timur lebih bernilai ekonomis dan memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Selain itu, Wisata Mangrove Kedatim telah memberikan PAD di tahun pertamanya, berikut seperti yang disampaikan Direktur BUMDes:

“Kita memang tergolong baru mbak, tetapi alhamdulillah di tahun pertama kita berdiri yaitu ditahun 2021, wisata mangrove ini beromset 500 juta dan kita berhasil menyumbang PAD ke desa mungkin tidak besar hanya 10 juta. Dengan omset yang kita dapatkan kita gunakan sebagai modal untuk menambah fasilitas dan memperbaiki fasilitas yang ada di Wisata Mangrove Kedatim ini”

Hal tersebut sesuai dengan Undang – Undang No.6 Tahun 2014 tentang desa, yang dimana potensi desa dapat menjadi peluang bagi desa agar dikembangkan secara mandiri serta sesuai kebutuhan masing masing untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun peran BUMDes sebagai mediator dalam pengelolaan Wisata Mangrove Kedatim dengan menjadi perantara dengan pihak-pihak yang terlibat, yaitu mensosialisasikan hasil-hasil usulan rencana dalam pengelolaan Wisata Mangrove Kedatim yang sudah ditetapkan oleh BUMDes itu sendiri guna meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar sekaligus menambah pendapatan asli desa. Sebagaimana yang sudah pernah dilakukan dengan menghadap dan duduk di pemerintahan desa untuk mengusulkan rencana rehabilitasi dan pengelolaan pada potensi mangrove yang dimiliki Desa Kebun Dadap Timur. Seperti yang disampaikan oleh Susanti (2017) agar perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan serta pengembangan potensi desa berjalan optimal dibutuhkan adanya kehadiran pendamping desa menjadi salah satu keberhasilan dalam pelestarian hasil-hasil pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pihak atau stakeholder yang terlibat diantaranya, Pemerintah Desa Kebun Dadap Timur, Pokdarwis, Pokmaswas Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora) Kabupaten Sumenep, sehingga Wisata Mangrove Kedatim saat ini menjadi salah satu desa wisata yang dapat dijadikan contoh bagi desa lainnya. Hal yang sama mengenai kehadiran pendamping desa disampaikan oleh Direktur BUMDes Pasopati;

“Kalau perangkat desa, alhamdulillah selalu mensupport kegiatan kita, apalagi khususnya wisata mangrove ini, seperti contohnya ketika ada tamu, atau pihak dari instansi lain yang ingin berkunjung ke wisata mangrove ini atau ada undangan dari kita dan sebagainya, beliau para perangkat desa selalu menyempatkan hadir, menurut saya itu sudah merupakan bentuk kepedulian dan bisa dibilang kita berhasil menjadi perantara”

Peran BUMDes lainnya adalah sebagai motivator dalam pengelolaan Wisata Mangrove Kedatim yaitu usaha dalam mendorong masyarakat dan pemerintah desa lebih peduli dan mempunyai rasa memiliki yang lebih besar sehingga mendatangkan wawasan yang lebih luas mengenai potensi desa yang dimiliki agar dapat memberikan masukan terhadap badan usaha untuk lebih berkembang lagi atau lebih optimal dalam pengelolaan potensi desa. Selain itu, dengan berkembangnya badan usaha juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan juga pendapatan asli desa serta kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri. Bentuk motivasi yang diberikan oleh BUMDes Pasopati dalam pengelolaan Wisata Mangrove Kedatim yaitu dengan bagaimana caranya masyarakat maupun pemerintah desa dapat merawat, menjaga dan melestarikan mangrove sebagai potensi desa Kebun Dadap Timur agar dapat lebih bernilai ekonomis melalui sosialisasi, pelatihan ataupun terjun secara langsung sebagai bentuk contoh menjaga dan merawat mangrove sebagai ekowisata yang dikembangkan di Desa Kebun Dadap Timur, dalam hal ini prosesnya sangat tidaklah mudah berikut seperti yang dituturkan oleh Direktur BUMDes Pasopati:

“Storynya memang ngga mudah mbak,soalnya kita kan lingkungan, waktu awal awal rehabilitasi mangrove, hari ini menanam besoknya pagi waktu kita cek sudah ada warga yang mencabut apa yang kita tanam. Karena kita juga tidak bisa menyalahkan mereka, karena mereka masih belum faham apasih manfaat mangrove? Apasih fungsi mangrove? Jadi ya kita bertahap secara perlahan mensosialisasikan seperti “pak ini kita tanam, nanti kalau sudah besar hasil kepiting dan ikan ikan disini akan melimpah, jadi sampean tidak usah jauh jauh untuk keluar mencari ikan” tapi ya namanya masyarakat, mangrove dianggap mengganggu jaring mereka jadi kita harus benar-benar ekstra sabar dan pelan-pelan menjelaskannya”

“Dengan adanya kejadian tersebut, kita berangkat ke kepala desa bersama para pemuda dengan berniat sosialisasi ke tingkat RT, kita sosialisasikan manfaat dan pentingnya mangrove, karena ga semua ngerti kan mbak, kita jelaskan dasar hukum dan sebagainya”

“Susah mbak mengubah pemikiran masyarakat atau orang-orang yang tidak peduli dengan mangrove, kalau saya suruh berubah dengan saya kasih uang, mungkin hal tersebut hanya bertahan 1/2 hari saja tapi setelah itu akan balik lagi, beda kalau ngerubahnya dengan mindset butuh proses lagi. Makanya, contoh saja pekerja harian atau karyawan disini, dari awal selain mereka kerja secara ga langsung itu juga kita sentil “kalo ada wisata kaya gini apalagi ada kaitannya dengan lingkungan, itu sampah plastik dan sebagainya itu yang paling menjadi musuh terberat kita” nah, kaya gitu mba mungkin 1-2 hari saya ngomong gitu mereka ga ngeh, tapi lama kelamaan kaya tersugesti, pulang kerja lihat kresek sampah diambil, dibuang dan sebagainya. Bahkan sangking punya rasa memilikinya, biasanya kita istirahat jam 4 sore ada kerjaan atau bersih-bersih tanggung itu mereka selesaikan”

Oleh karena itu, BUMDes mempunyai tanggungjawab tersendiri berperan sebagai motivator dan tetap bertanggungjawab dalam menjaga dan merawat ekowisata tersebut, yang nantinya dapat dicontoh oleh masyarakat sekitar

ekowisata. Seperti halnya definisi ekowisata dalam penelitian Safuridar & Andiny (2019) bahwa menurut The International Ecotourism Society Ekowisata merupakan bentuk perjalanan pariwisata ke kawasan alami dengan bertanggung jawab untuk mengkonservasi lingkungan dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat lokal.

Dampak Wisata Mangrove Kedatim pada Perekonomian Masyarakat Lokal

Menurut Surono (2017) Dalam ketentuan Undang-Undang Desa, Desa mampu karena kekuasaan berdasarkan hak yang semula diberikan, kewenangan daerah pada tingkat desa, kewenangan sesuai dengan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau kota/kota; dan kewenangan lain yang diberikan oleh pemerintah. Kekuasaan dalam UU desa menjadi landasan bagi desa dalam mengatur serta mengelola sumber daya alam skala desa, termasuk dalam pengelolaan sektor wisata skala desa. Wisata Mangrove Kedatim salah satu wisata yang di kelola dalam skala desa, yang artinya dalam pengelolaannya melibatkan peran masyarakat lokal serta manfaat yang didapat juga diberikan untuk masyarakat desa. Disampaikan oleh Purmada et al., (2016) bahwa pariwisata berbasis masyarakat dianggap memiliki manfaat bagi masyarakat dalam berbagai cara, termasuk meningkatkan kesejahteraan, melindungi lingkungan, dan menjaga kehidupan sosial dan budaya. Seperti halnya yang diutarakan oleh Hariyanto (2016) bahwa kontribusi atau dampak positif dari kegiatan pariwisata di desa wisata terhadap kehidupan ekonomi masyarakat setempat merupakan isu utama yang mempengaruhi perkembangan mereka. Kontribusi atau dampak positif aktivitas pariwisata yang dimaksud ialah peningkatan perekonomian masyarakat dan kesejahteraan masyarakat.

Hutan mangrove menjadi salah satu ekowisata yang patut dikembangkan, dengan melihat kondisi hutan mangrove saat ini yang sangat mengkhawatirkan dan mulai terancam kualitasnya. Maka dari itu adanya pengembangan ekowisata mangrove diharapkan mampu melestarikan dan menjaga kualitas mangrove. Agar keberlanjutan ekowisata mangrove tetap terjaga dan tetap dapat dinikmati pada masa yang akan datang, mangrove sepatutnya layak untuk dikembangkan dan dikelola. Karena Menurut Agussalim (2014) hutan mangrove memiliki tingkat produktivitas tinggi dan mempunyai beberapa fungsi dalam ekonomi, sosial dan yang paling penting lingkungan. Artinya secara tidak langsung keberadaan hutan mangrove akan memberikan kontribusi terhadap kehidupan masyarakat sekitar, dengan menunjang perkembangan sosial dan tingkat perekonomian masyarakat sekitar. Hutan mangrove salah satu sumber produksi hutan yang mempunyai nilai ekonomis, seperti kayu, bahan pewarna, sumber pangan, bahan kosmetik, sumber pakan ternak dan lebah, bahkan dapat digunakan sebagai penyamak kulit. Dengan begitu dalam pengembangan ekowisata hutan mangrove, dapat melibatkan masyarakat secara langsung untuk menikmati manfaatnya. Terlepas dari itu, kegiatan ekowisata mangrove juga merupakan jalan alternatif guna mengatasi permasalahan lingkungan seperti penebangan mangrove secara liar dan melampaui batas yang dilakukan oleh masyarakat.

Hasil dari penelitian mengenai dampak Wisata Mangrove Kedatim terhadap perekonomian masyarakat lokal di Desa Kebun Dadap Timur telah dirasakan dampaknya oleh masyarakat Desa Kedatim. Terutama pada masyarakat yang memiliki usaha, seperti UMKM makanan, penjual kayu, bahan bangunan, dan juga warga yang memiliki tempat tinggal kosong sehingga dapat

dijadikan homestay atau penginapan bagi tamu wisata maupun tamu yang sedang melakukan penelitian di Wisata Mangrove Kedatim. Disampaikan oleh direktur BUMDes Pasopati bahwa dalam pengembangan atau pengelolaan Wisata Mangrove Kedatim pembelian barang dan bahan yang dibutuhkan dalam pembangunan wisata dibeli secara langsung pada usaha masyarakat Desa Kebun Dadap Timur. Begitu juga dengan rumah warga yang dibiarkan kosong, sekarang berubah menjadi homestay atau penginapan, dengan melihat banyaknya pihak yang berminat melakukan penelitian maupun sekedar berwisata di Mangrove Kedatim. Kemudian dari pihak BUMDes sendiri mewajibkan para wisatawan yang menginap untuk membeli makanan pada UMKM makanan yang sudah tersedia di Desa Kebun Dadap Timur. Selain itu, disampaikan kembali oleh direktur BUMDes Pasopati mengenai penyerapan tenaga kerja;

“Dan alhamdulillah kita mampu menyerap tenaga kerja, juga kita memprioritaskan dan mewajibkan pekerja di wisata kedatim harus masyarakat setempat, sejauh ini sudah 14 karyawan yang bekerja di wisata mangrove kedatim, begitu juga dengan lahan parkir kita pasrahkan ke masyarakat. Hal ini agar masyarakat mempunyai rasa memiliki, bahkan tiket masuk untuk masyarakat desa kebun dadap timur kita freekan atau gratiskan”

Dengan begitu masyarakat sekitar dapat merasakan manfaat atau dampak positif dengan adanya Wisata Mangrove Kedatim.

PENUTUP

Kesimpulan

Peran BUMDes sangat dibutuhkan dalam mengembangkan atau mengelola potensi dan usaha yang dimiliki oleh desa. Pengembangan ataupun pengelolaan potensi desa yang bertajuk wisata dapat dikelola dalam skala desa dengan berada dibawah naungan BUMDes. Dengan pengelolaan yang tepat dan benar maka pendapatan masyarakat dapat meningkat. Pada pengelolaan Wisata Mangrove Kedatim di Kabupaten Sumenep, BUMDes Pasopati telah maksimal berperan sebagai fasilitator, mediator dan motivator. Keberhasilan ini dapat dilihat dari pembangunan wisata yang masih 45% tapi mampu menyumbang PAD ditahun pertama wisata dibuka. Dampak positif adanya Wisata Mangrove Kedatim dan manfaatnya pun dirasakan oleh masyarakat lokal. Dengan terbukanya lapangan kerja baru, tersedianya lahan bisnis baru bagi UMKM sekitar, menghasilkan pendapatan baru bagi warga dengan membuka homestay dan dampak yang penting lainnya dalam lingkup lingkungan.

Saran

Berdasarkan hasil dan pengamatan penelitian dilapangan, beberapa indikator saran yaitu :

1. BUMDes diharapkan mampu untuk membuka lebih luas lahan bisnis di sekitar Wisata Mangrove Kedatim bagi UMKM yang ada di Desa Kebun Dadap Timur sehingga manfaat dan dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat kedatim yang lebih luas.
2. Pemerintah sebaiknya lebih gencar membantu BUMDes dalam memberikan dukungan berupa penyuluhan terhadap masyarakat akan

pentingnya mangrove dan potensi yang dimiliki mangrove bagi perekonomian mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Agussalim, A., & Hartoni, H. (2014). Potensi kesesuaian mangrove sebagai daerah ekowisata di Pesisir Muara Sungai Musi Kabupaten Banyuasin. *Maspari Journal*, 6(2), 148–156. <https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/maspari/article/viewFile/3037/1591>
- Dewi, M. H. U. (2013). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal Di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan, Bali. *Jurnal Kawistara*, 3(2), 129–139. <https://doi.org/10.22146/kawistara.3976>
- Dwiningwarni, S. S., & Amrulloh, A. Z. (2020). Peranan Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Di Jombang Jawa Timur. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 4(1), 1–20. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2020.v4.i1.4128>
- Hariyanto, O. I. B. (2016). Destinasi Wisata Budaya dan Religi di Cirebon. *Jurnal Ecodemica: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Bisnis*, 4(2), 214–222. <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/ecodemica/article/view/830>
- Huda, R. (2020). Pengembangan Ekonomi Lokal Melalui Sektor Pariwisata di Desa Serang, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 11(2), 157–170. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v11i2.1470>
- I Kadek Darwita, D. N. R., & Redana, D. N. (2018). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Dan Penanggulangan Pengangguran Di Desa Tejakula Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng. *Locus Majalah Ilmiah FISIP*, 9(1), 51–60.
- Ishak, D., Maolani, D. Y., & Engkus. (2017). *Konsep kinerja dalam studi organisasi publik*.
- Kapita, F., Kaawoan, J. E., & Lengkong, J. P. (2017). Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Suatu Studi Di Desa Wayafli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur). *Jurnal Eksekutif*, 1(1), 1–14.
- Kushartono, E. W. (2016). *PENGEMBANGAN DESA MANDIRI MELALUI PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)* Fitrie Arianti Universitas Diponegoro Semarang.
- Maryam, B., Nurhayati, H., & M, R. (2022). Peran BUMDes Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Di Padang Lawas. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(01), 2. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/4534/2128>
- Mulyana, N., Fauziyyah, H., & Resnawaty, R. (2017). Pengembangan Ekonomi Lokal Jatinangor Melalui Wisata Edukasi. *Share : Social Work Journal*, 7(1), 115. <https://doi.org/10.24198/share.v7i1.13827>
- Munawaroh, R. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat Di Taman Nasional Gunung Merbabu Suwating, Magelang. *Jurnal Elektronik Mahasiswa Pend. Luar Sekolah - S1, Volume 06(4)*, 374–389.
- Nur Istiyan Harun, Annisa Rizqa Alamri, Dewi Walahe, K. R. J. (2021). Manajemen Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Gorontalo*, 3(1).
- Pangestu, A. T. (2020). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kedungrejo Kecamatan Waru

- Kabupaten Sidoarjo. *Administrasi Negara*, 126–133.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2021. *Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Milik Desa*, 1–71.
- Prasetyo, D. (2019). *Peran BUMDes dalam Membangun Desa*. CV. DERWATI PRESS.
- Prayudi, M. A., Sari Dewi, G. A. K. R., Vijaya, D. P., & Ekawati, L. P. (2019). Teori Peran Dan Konsep Expectation-Gap Fungsi Pengawasan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 2(4), 449–467. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2018.v2.i4.3931>
- Purmada, D., Wilopo, W., & Hakim, L. (2016). Pengelolaan Desa Wisata dalam Perspektif Community Based Tourism (Studi Kasus pada Desa Wisata Gubugklakah, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Bisnis S1 Universitas Brawijaya*, 32(2), 15–22.
- Riyanto, S., Mardiansjah, H., Uptd,), Legal, M., Semarang, K., Magister,), Wilayah, P., Kota, D., & Semarang, U. (2018). Pengembangan Industri Pengolahan Perikanan Dalam Pengembangan Ekonomi Lokal the Development of Fisheries Industry in the Local Economic Development. *Jurnal Litbang*, XIV(2), 107–118.
- Safuridar, S., & Andiny, P. (2019). Dampak Pengembangan Ekowisata Hutan Mangrove terhadap Sosial dan Ekonomi Masyarakat di Desa Kuala Langsa, Aceh. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 43–52. <https://doi.org/10.33059/jseb.v11i1.1882>
- Sukmadinata, N. S. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Remaja Rosdakarya.
- Surono, A. (2017). Peranan Hukum Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Skala Desa Oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(3), 459. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i3.195>
- Susanti, M. H. (2017). Peran Pendamping Desa Dalam Mendorong Prakarsa Dan Partisipasi Masyarakat Menuju Desa Mandiri Di Desa Gonoharjo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal. *Integralistik*, 1, 29–39.